

INFORMED CONSENT :
STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
PADA TINDAKAN OPERASI
DI RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG SRAGEN



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Pascasarjana pada
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

TRİYANTA

NIM: R 100090014

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

INFORMED CONSENT :
**STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
PADA TINDAKAN OPERASI
DI RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG SRAGEN**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

TRİYANTA

NIM: R 100090014

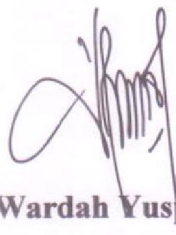
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H

Pembimbing II



Wardah Yuspin, Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN

INFORMED CONSENT :
**STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
PADA TINDAKAN OPERASI
DI RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG SRAGEN**

OLEH

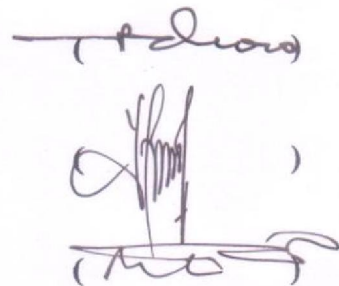
TRIYANTA

NIM: R 100090014

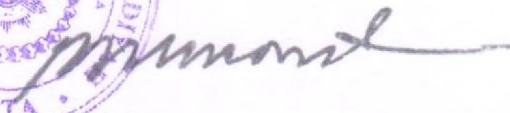
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 8 Desember 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:

1. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Wardah Yuspin, Ph.D**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Nurhadiantomo**
(Anggota II Dewan Penguji)



Direktur,


Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis dan diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 2 Desember 2017

Penulis



TRIYANTA

NIM: R 100090014

INFORMED CONSENT :
STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
PADA TINDAKAN OPERASI
DI RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG SRAGEN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengkaji penerapan *informed consent* pada pelayanan medik di rumah sakit, 2) untuk mendapatkan kajian tentang perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi layanan tindakan medik terkait dengan *informed consent*. Jenis penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal yang kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pasien atau keluarga dan dokter yang melakukan operasi. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong sudah menerapkan prosedur tindakan operasi dengan *Informed Consent* (Persetujuan Tindakan Kedokteran), hal ini sudah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Permenkes RI nomer 290 tahun 2008. 2) kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian *Informed Consent* menunjukkan adanya perlindungan hak bagi konsumen dan kewajiban bagi dokter yang melakukan tindakan operasi bedah.

Kata kunci: *Informed Consent*, pasien, dokter, perlindungan hukum, penerapan

Abstract

This study aims to 1) to review the application of informed consent to medical services in hospitals, 2) to obtain review of legal protection for recipients and providers of medical action related to informed consent. This type of research is a qualitative non-doctrinal research. Informants in this study are patients or families and doctors who perform surgery. Techniques of collecting interview data, observation and literature study. Data analysis technique using qualitative analysis method. The results of this study indicate: 1) Regional General Hospital dr. Soeratno Gemolong has implemented operational procedures with Informed Consent, this is in accordance with Article 3 paragraph 1 Permenkes RI number 290 in 2008. 2) agreements contained in the agreement Informed Consent shows the existence of consumer rights protection and liability for doctors who perform surgery.

Keywords: Informed Consent, patient, doctor, legal protection, application

1. PENDAHULUAN

Menurut Realita, aspek hukum terjadi karena adanya interaksi antar manusia. Hubungan antar orang dengan orang tergolong dalam hukum perdata, demikian halnya interaksi atau hubungan antara dokter dengan pasien. Hubungan hukum

perdata terjadi di semua bidang, dan salah satunya adalah perjanjian yang dilakukan untuk memperjelas dan mempertegas hubungan antar dua pihak atau lebih.¹ Dua subyek hukum terkait hukum kedokteran, melibatkan dokter dan pasien sebagai dua subjek hukum, keduanya membentuk baik hubungan medis maupun hubungan hukum.

Pelaksanaan tindakan medis infasif harus memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya, diwujudkan dalam bentuk dokumen *informed consent*.² *Informed consent* merupakan salah satu dasar pertimbangan para dokter dalam mengambil tindakan medik untuk menyelamatkan nyawa pasiennya, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (selanjutnya disebut Permenkes Pertindok).

RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen merupakan rumah sakit yang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap para pasiennya juga melakukan prosedur persetujuan tindakan kedokteran. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, hasil survei terkait pelaksanaan *informed consent* diketahui bahwa pihak RSUD dr. Soeratno Gemolong telah mengeluarkan prosedur tetap (protap) terkait pelaksanaan *informed consent*, namun masih terdapat petugas yang berwenang dalam proses penanganan pasien, belum patuh melaksanakan *informed consent* sesuai prosedur dimana terlihat sebagian besar formulir *informed consent* yang tidak diisi dengan lengkap dan singkatnya pemberian informasi terhadap pasien, sehingga dirasakan kurang jelas oleh pasien.

Sebagaimana fenomena yang ditemukan dilapangan dan hak pasien yang dituangkan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tersebut, akibat adanya form *informed consent* yang tidak isi, permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana langkah perlindungan hukum terhadap pasien bila terjadi kegagalan operasi.

¹ Realita, Friska. 2014 Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Jurnal Involusi Kebidanan*, Vol. 4, No. 7, Januari 2014, hal. 26

² Samino. 2014. Analisis Pelaksanaan Informed Consent. *Jurnal Kesehatan*, Volume V, Nomor 1, April 2014, hlm 71

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengkaji penerapan *informed consent* pada pelayanan medik di rumah sakit, 2) untuk mendapatkan kajian tentang perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi layanan tindakan medik terkait dengan *informed consent*.

2. METODE

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Bentuk penelitian ini adalah penelitian evaluatif-diagnostik karena dalam hal ini penulis ingin mengetahui sebab-sebab penerapan *informed consent* di RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen yang tidak lengkap dan belum dapat melindungi pasien. Soekanto menyampaikan bahwa bentuk penelitian diagnostik merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan penyebab program-program dapat dijalankan atau kurang bisa dijalankan.³

Penulisan tesis ini termasuk penelitian hukum sosiologis (non doktrinal), maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah : jenis dan sumber data primer (perilaku dan situasi *human resources management* RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen) dan data sekunder (studi kepustakaan). Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan *Informed Consent* pada Tindakan Operasi di Rumah Sakit

Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Ibu Diah Hayustiningsih selaku Dokter Spesialis THT RSUD Dr. Soeratno Gemolong, Sragen, maka dapat diketahui bahwa RSUD dr. Suratno Gemolong sudah menerapkan prosedur tindakan operasi dengan *Informed Consent* (persetujuan tindakan kedokteran), hal ini sudah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Permenkes RI nomer 290 tahun 2008, yang menyatakan bahwa “Setiap tindakan kedokteran

³ Soekanto, Soerjono. 2009. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 10

yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan”.

Prosedur penerapan *informed consent* pada tindakan operasi di RSUD dr. Soeratno Gemolong, Sragen mengacu pada Permenkes Nomer 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan kedokteran. Prosedur yang dilakukan dalam perjanjian yang dilaksanakan antara dokter dan pasien dalam tindakan operasi adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pemberian Informasi dari Dokter kepada Pasien (*Informed Consent*)

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Derajat Bayu selaku salah satu dokter di Bagian Bedah RSUD Dr. Soeratno Gemolong, Sragen, dapat diketahui bahwa sebelum pasien dioperasi maka dijelaskan mengapa tindakan medis tersebut diperlukan dan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pasien dan atau keluarganya. Keluarga pasien akan dijelaskan adanya faktor risiko di setiap tindakan, misalnya pendarahan, infeksi, luka lama, hingga kematian. Tidak ada tindakan jika pasien dan keluarga tidak setuju. Jika pasien atau keluarga tidak setuju, maka akan diberikan lembar penolakan tindakan kedokteran.⁴

Selanjutnya dijelaskan juga kapan tindakan tersebut akan dilakukan, dalam waktu berapa lama, serta gambaran singkat mengenai alat yang akan digunakan. Selain itu dijelaskan juga mengenai bagian tubuh yang akan mengalami tindakan dan untuk tindakan yang memerlukan pembiusan, diberitahukan sebelumnya kepada pasien.

3.1.1.1 Risiko dari tindakan kedokteran pada pasien

Dokter harus menjelaskan mengenai risiko yang dihadapi oleh pasien yang akan terjadi tanpa bermaksud menakut-nakuti. Menurut Pasal 7 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang akan dilakukan baik diagnosis maupun terapeutik".

⁴ Derajat Bayu. 2017. Dokter di Bagian Anestesi RSUD Dr. Soeratno Gemolong. *Wawancara Pribadi*, Senin 28 September 2017 Jam 15.30 WIB

Risiko tersebut harus dijelaskan secara lengkap dan jelas kepada pasien. Adapun risiko yang harus dijelaskan tersebut meliputi berat ringannya risiko, kemungkinan risiko tersebut timbul, dan kapan risiko tersebut timbul seandainya tindakan tersebut dilakukan.

3.1.1.2 Alternatif tindakan kedokteran lain yang tersedia

Dalam memberikan informasi, dokter harus menjelaskan mengenai alternatif tindakan kedokteran yang akan dilakukannya tersebut. Alternatif pertama yang ditawarkan kepada pasien merupakan pilihan yang terbaik untuk pasien. Namun seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa segala tindakan kedokteran yang dilakukan di RSUD Dr. Soeratno harus disesuaikan dengan prosedur dan tahapan pendidikan.

3.1.1.3 Penjelasan mengenai prognosis dan biaya

Dalam pemberian informasi, dokter harus menjelaskan mengenai jalannya penyakit, hal ini bertujuan agar pasien benar-benar mengetahui keadaan yang terjadi pada dirinya. Selain itu dijelaskan juga mengenai biaya yang harus dibayar dari tindakan kedokteran yang harus dilakukan terhadapnya, hal ini bertujuan agar dapat memberikan pertimbangan bagi pasien dalam mengambil keputusan. Mengenai pihak yang memberikan penjelasan *informed consent* adalah dokter. Dokter dalam hal ini adalah dokter yang akan melakukan tindakan kedokteran tersebut, atau sering disebut dengan dokter operator. Tetapi apabila dokter berhalangan, maka penjelasan dapat diwakilkan kepada dokter residen yang ditunjuk. Informasi diberikan dengan bahasa yang sederhana dan jelas serta disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan intelektual dari pasien, sehingga pasien dapat mengerti dengan jelas. Hal ini dikarenakan di sebagian ruang rawat inap RSUD Dr. Soeratno masih terdapat pasien dengan tingkat pendidikan yang rendah, yang membutuhkan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami.

3.1.2 Perjanjian Tindakan Operasi Atas Dasar *Informed Consent*

Hasil penelusuran dokumen *informed consent* yang digunakan di ruang perawatan bedah RSUD dr. Soeratno Gemolong, sebelum dilakukan tindakan operasi, pihak rumah sakit memberikan dokumen perjanjian tindakan kedokteran atas dasar *informed consent* yang harus ditanda tangani oleh pasien dan atau keluarga

sebagai penanggung jawab dan 2 orang saksi yaitu dari pihak keluarga dan rumah sakit. Dokumen perjanjian atas dasar *informed consent* terdiri dari 2 bagian yaitu pemberian informasi dan persetujuan tindakan kedokteran. Hal ini sudah sesuai dengan Permenkes Nomer 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dokumen persetujuan tersebut sekaligus sebagai dokumen perjanjian tindakan kedokteran.

3.1.3 Sifat Perjanjian Tindakan Operasi Atas Dasar *Informed Consent*

Sifat perjanjian ini bersifat mutlak, artinya harus ada (wajib) persetujuan dari pasien atau keluarganya sebelum tindakan operasi dilaksanakan, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permenkes Nomer 290 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. *Informed consent* tersebut harus diberikan secara benar, jujur serta tidak bermaksud untuk menakut-nakuti atau bersifat memaksa.

Mengenai penandatanganan surat persetujuan tersebut dilakukan oleh pasien atau keluarganya. Dari pihak rumah sakit, diwakili oleh dokter operator. Serta dilakukan dihadapan dua orang saksi di antaranya satu orang saksi dari pihak rumah sakit dan satu orang saksi dari pihak pasien. Bagi pasien yang akan melakukan tindakan operasi, maka disertai tanda tangan dokter anastesi. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan sebelum tindakan kedokteran tersebut dilakukan.

Penandatanganan perjanjian ini merupakan pengukuhan apa yang telah disepakati bersama. Dengan menandatangani perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak telah bersepakat dengan apa yang ada dalam isi perjanjian dan bersedia memenuhi segala hak dan kewajiban yang timbul setelah perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur padalam Pasal 3 ayat 1 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008, tentang persetujuan tindakan kedokteran menyatakan bahwa "Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan".

3.1.4 Bentuk Perjanjian Tindakan Operasi Atas Dasar *Informed Consent*

Bentuk perjanjian tindakan kedokteran pada pasien di RSUD Dr. Soeratno pada umumnya yang dibuat dalam bentuk tertulis. perjanjian tindakan kedokteran pada pasien di RSUD Dr. Soeratno merupakan perjanjian baku dikarenakan bentuk dan isi perjanjian ditetapkan secara sepihak yaitu oleh pihak rumah sakit dalam suatu bentuk tertentu (tertulis) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara massal. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan untuk bertindak cepat dari dokter/rumah sakit dan tetap melindungi para pihak.

Isi dari perjanjian tindakan kedokteran pada pasien di RSUD Dr. Soeratno memuat adanya keadaan khusus yang harus disepakati untuk dipenuhi. Isi dari perjanjian tersebut meliputi pernyataan persetujuan dari pasien atau keluarganya yang diberikan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, pernyataan bahwa pasien telah mendapatkan penjelasan dari dokter dan mengerti sifat, tujuan, risiko dan perlunya tindakan kedokteran yang akan dilakukan pada pasien yang akan dioperasi. Selain itu, disertai pula penandatanganan oleh para pihak yang terkait yaitu pasien/keluarganya, dokter operator maupun dokter anastesi serta dua orang saksi yang masing-masing satu orang dari pihak rumah sakit dan satu orang dari pihak pasien. Penandatanganan dilakukan untuk sahkan perjanjian tindakan kedokteran pada pasien, karena berarti kedua belah pihak telah menyetujui hal-hal pokok yang telah diperjanjikan.

3.2 Perlindungan hukum terhadap pasien yang terlibat dalam *Informed Consent* pada tindakan operasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen

Berdasarkan konsep *informed consent* yang timbul berdasarkan hubungan antara dokter dengan pasien maka terjalin suatu perjanjian dan masing-masing pihak, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Artinya bahwa di satu pihak dokter mempunyai kewajiban untuk melakukan diagnosis, pengobatan dan tindakan kedokteran yang terbaik menurut jalan pikiran dan pertimbangannya, tetapi pasien

atau keluarganya mempunyai hak untuk menentukan pengobatan atau tindakan kedokteran apa yang akan dilakukan terhadap dirinya.

Berdasarkan hasil penelitian, ada dua pihak yang bertanda tangan dalam perjanjian tindakan operasi di RSUD Dr. Soeratno yaitu pihak pasien dan pihak dokter yang mewakili rumah sakit.

3.2.1 Hak dan Kewajiban Pasien

Hak pasien mencakup hak atas informasi medik, hak memberikan persetujuan tindak medik, hak untuk memilih dokter dan rumah sakit, hak atas rahasia medik, hak untuk menolak pengobatan atau perawatan secara tindak medik, hak untuk mendapat penjelasan lain (*second opinion*), serta hak untuk mengetahui isi rekam medik.

Hak-hak pasien di atas sesuai dengan Pasal 32 UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan beberapa hak pasien, yakni hak atas Informasi, hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi, hak atas kerahasiaan, hak atas persetujuan tindakan medis, hak atas masalah spiritual, dan hak atas ganti rugi. Menurut UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada Pasal 4 hingga Pasal 8 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan; akses atas sumber daya; pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan; lingkungan yang sehat; info dan edukasi kesehatan yg seimbang dan bertanggungjawab; dan informasi tentang data kesehatan dirinya.

Selanjutnya kewajiban pasien antara lain: kewajiban memberikan informasi medik, mentaati petunjuk atas nasehat dokter, memenuhi aturan-aturan pada sarana kesehatan, memberikan imbalan jasa kepada dokter, berterus terang, serta menyimpan rahasia pribadi dokter yang diketahuinya.

Kewajiban-kewajiban pasien di atas sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 53 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang meliputi: memberi informasi yg lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi, mematuhi ketentuan yang berlaku di saryankes, dan memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Selain kewajiban-kewajiban di atas, karena pasien yang memerlukan tindakan operasi ini ditangani di rumah sakit, maka berlaku pula UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 31 UU ini menyatakan: Kewajiban pasien yang dimaksud dalam ayat ini antara lain bahwa setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang di terimanya, mematuhi ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit, dan mematuhi kesepakatan dengan Rumah Sakit.

3.2.2 Hak dan Kewajiban Dokter

Hak-hak dokter antara lain adalah sesuai dengan hak-hak dokter yang diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak, yaitu: memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasi, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, serta menerima imbalan jasa.

Hak-hak dokter di atas sesuai literatur yang diperoleh dari Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 menyebutkan dokter memiliki hak, yaitu: Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien, hingga hak mendapatkan imbalan atas jasa profesi.

Kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokterannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang diantaranya adalah: wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasi serta kebutuhan pasien.

Kewajiban dokter tersebut sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 menyebutkan dokter memiliki kewajiban, yaitu memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan menghormati hak pasien, memberikan informasi yang cukup tentang perlunya tindakan medis dan resiko yang dapat terjadi serta memenuhi hal-hal yang telah disepakati yang telah dibuatnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, beberapa kewajiban dokter dalam profesi medik yang penting adalah kewajiban untuk bekerja sesuai dengan Standar Profesi. Seorang dokter yang menyimpang dari standar profesi, dikatakan telah melakukan kelalaian atau kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari malpraktek medik, yaitu apabila kesalahan atau kelalaian tersebut bersifat sengaja (*dolus*) serta menimbulkan akibat serius atau fatal pada pasien.

Kewajiban memberikan informasi tentang tindak medik yang akan dilakukan terhadap pasien. Kewajiban ini berdasarkan hak pasien untuk mengetahui semua informasi medik yang dipahaminya, sehingga pasien dapat memutuskan menerima atau tidak tindakan medik atas dirinya.

Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran, kewajiban ini diatur dalam pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, sedangkan yang terkait dengan keberadaan dokter sebagai pegawai Rumah sakit, terdapat didalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas kesalahan/kelalaian yang dilakukan dokter terhadap pasien, maka Derajat Bayu memberikan penjelasan bahwa rumah sakit bertanggungjawab terhadap masalah hukum yang dilakukan oleh dokter, karena dokter merupakan tenaga kesehatan rumah sakit.⁵ Hal ini sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa: “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah sakit”.

Kesalahan yang dilakukan oleh dokter di RSUD Dr. Soeratno merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan RSUD Dr. Soeratno merupakan rumah sakit pemerintah dan dokter yang bekerja merupakan dokter *in* atau dokter tetap. Berdasarkan hal tersebut, maka dokter bekerja untuk dan atas nama rumah sakit, sehingga jika terjadi tuntutan dari pasien atas kesalahan yang dilakukan dokter, maka rumah sakit yang bertanggung jawab atas tindakan dari

⁵ Derajat Bayu. 2017. Dokter di Bagian Anestesi RSUD Dr. Soeratno Gemolong. *Wawancara Pribadi*, Senin 28 September 2017 Jam 15.30 WIB

dokter tersebut, dan segala ganti kerugian yang diderita pasien merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Hal ini sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Rumah Sakit.

Mengenai kesalahan dengan tingkat kerugian pasien yang cukup besar, adalah adanya seorang pasien yang meninggal atau mengalami cacat permanen yang tidak dapat disembuhkan. Maka dalam hal besar kecil, bentuknya dan sejauh mana penggantian kerugian tersebut, rumah sakit akan mendiskusikan lebih lanjut dengan komite medik mengenai kesalahan yang dilakukan oleh dokter tersebut. Dalam hal ini, maka rumah sakit dalam hal pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran, kepastian tersebut didapatkan setelah pihak rumah sakit mendiskusikan bersama dengan komite medik. Dari hasil musyawarah atau diskusi tersebut maka pihak rumah sakit akan memberikan penggantian kerugian atas kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran.¹⁹

Berkaitan dengan kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang bekerja di rumah sakit, maka rumah sakit akan mengkonsultasikan tindakan kesalahan yang dilakukan oleh dokter tersebut kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia), apakah tindakan tersebut harus mendapat sanksi tertentu atau tidak. Hal ini dikarenakan seluruh dokter khususnya dalam hal ini dokter yang bekerja di RSUD Dr. Soeratto bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Sanksi tersebut disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh dokter tersebut. Dalam hal malpraktek etik, IDI telah mempunyai Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), baik di tingkat pusat maupun tingkat cabang serta Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK) yang terdapat pula di pusat dan di tingkat propinsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara dokter dengan pasien termasuk dalam perjanjian untuk melakukan beberapa jasa dan karena sifat hubungan hukumnya yang khusus yaitu *Inspanning Verbintenis* (perjanjian tentang upaya), sehingga dokter dalam hal ini berkewajiban untuk melakukan upaya semaksimal mungkin. Secara hukum hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu hubungan ikhtiar atau usaha maksimal. Pada perikatan ikhtiar

maka prestasi yang harus diberikan oleh dokter adalah upaya semaksimal mungkin. Dokter tidak pernah menjanjikan kesembuhan, akan tetapi berikhtiar sekuatnya agar pasien sembuh, sehingga sangat sulit untuk menentukan bahwa dokter melakukan kesalahan. Umumnya jika terjadi sesuatu yang di luar kehendak, maka dokter menyatakan bahwa mereka telah berusaha semaksimal mungkin.

Hal ini sesuai dengan pendapat Diah Hayustiningsih yang menyatakan bahwa Pasien secara yuridis tidak dapat diidentikkan dengan konsumen, hal ini karena hubungan yang terjadi di antara dokter dan pasien bukan merupakan hubungan jual-beli yang diatur dalam KUHPerdota, melainkan hubungan antara dokter dengan pasien hanya merupakan bentuk perikatan medik, yaitu perjanjian "usaha" (*inspanning verbinten*) tepatnya perjanjian usaha kesembuhan (terapi), bukan perikatan medik "hasil" (*resultaat verbinten*), disamping itu profesi dokter dalam etika kedokteran masih berpegang pada prinsip "pengabdian dan kemanusiaan", sehingga sulit disamakan antara pasien dengan konsumen pada umumnya.⁶

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian tentang upaya atau disebut *Inspaningsverbinten* bukan perjanjian tentang hasil atau disebut (*Resultaatverbinten*). Pada perjanjian tentang upaya maka prestasi yang harus diberikan oleh dokter adalah upaya semaksimal mungkin, sedangkan pada perjanjian tentang hasil, prestasi yang harus diberikan oleh dokter berupa hasil tertentu. Hubungan hukum *inspaning verbinten* antara dua subjek hukum (dokter dan pasien) tidak menjanjikan suatu kesembuhan / kematian, karena obyek dari hubungan hukum itu adalah berupaya secara maksimal yang dilakukan secara hati-hati dan cermat sesuai dengan surat persetujuan tindakan medik berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya dalam menangani penyakit tersebut, sehingga apabila terjadi kegagalan atau komplikasi dalam melakukan operasi maka hal tersebut merupakan tanggung jawab yang dipikul antara dokter dan pasien. Dokter tidak dipersalahkan oleh karena dokter yang bersangkutan telah

⁶ Diah Hayustiningsih. Dokter Spesialis THT RSUD Dr. Soeratno Gemolong. Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2017 Jam 14.30 WIB

membuktikan bahwa ia telah berusaha keras untuk menyembuhkan pasien atau mengupayakan berhasilnya tindakan operasi.

Tanggung jawab dokter yang menangani operasi baru muncul apabila dokter yang melakukan operasi tersebut melakukan kesalahan (*mal practice*) yang mengakibatkan kerugian pada pihak pasien. Pada dasarnya untuk menuntut tanggung jawab dokter yang mengoperasi karena kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien ada 2 macam yaitu: tanggung jawab atas kerugian yang didasarkan karena wanprestasi dan tanggung jawab dokter atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu pasien dapat minta pertanggungjawaban rumah sakit jikalau pasien/ keluarga merasa dirugikan akibat kelalaian atau tidak hati-hati dalam melakukan operasi di RS. Dr. Soeratno Gemolong, Sragen. Oleh RS tersebut adalah RS pemerintah maka RS pemerintah dapat dituntut berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata karena dokter yang melakukan operasi tersebut adalah pegawai yang bekerja pada RS pemerintah adalah pegawai negeri dan negara sebagai suatu badan hukum. Untuk itu RS pemerintah dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawainya, yaitu dokter yang melakukan operasi yang merugikan pasien.

4. PENUTUP

4.1 Penerapan *Informed Consent* pada Tindakan Operasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong sudah menerapkan prosedur tindakan operasi dengan *Informed Consent* (Persetujuan Tindakan Kedokteran), hal ini sudah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Permenkes RI nomer 290 tahun 2008, yang menyatakan bahwa “Setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan”. Adapun prosedur yang dilakukan dalam perjanjian yang dilaksanakan antara dokter dan pasien dalam tindakan operasi adalah sebagai berikut: 1) pemberian informasi dari dokter kepada pasien, 2) sifat perjanjian tindakan operasi atas dasar *informed consent*,

dan 3) bentuk perjanjian tindakan kedokteran pada pasien di RSUD Dr. Soeratno dibuat dalam bentuk tertulis.

4.2 Perlindungan hukum terhadap pasien yang terlibat dalam *Informed Consent* pada tindakan operasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen

Perlindungan hukum terhadap pasien yang terlibat dalam *Informed Consent* pada tindakan operasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen, terdapat pada tanggung jawab masing-masing atas hak dan kewajiban. Dalam perjanjian terapeutik, apa yang menjadi hak pasien seharusnya menjadi kewajiban tenaga kesehatan (dokter), dan apa yang menjadi hak tenaga kesehatan (dokter) seharusnya menjadi kewajiban pasien. *Informed Consent* merupakan hal penting dalam perjanjian terapeutik, karena dapat memberikan manfaat bagi dokter maupun bagi pasien.

Kesalahan yang dilakukan oleh dokter di RSUD Dr. Soeratno merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan RSUD Dr. Soeratno merupakan rumah sakit pemerintah dan dokter yang bekerja merupakan dokter *in* atau dokter tetap. Berdasarkan hal tersebut, maka dokter bekerja untuk dan atas nama rumah sakit, sehingga jika terjadi tuntutan dari pasien atas kesalahan yang dilakukan dokter, maka rumah sakit yang bertanggung jawab atas tindakan dari dokter tersebut, dan segala ganti kerugian yang diderita pasien merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Hal ini sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Realita, Friska. 2014 Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Jurnal Involusi Kebidanan*, Vol. 4, No. 7, Januari 2014.

Samino. 2014. Analisis Pelaksanaan Informed Consent. *Jurnal Kesehatan*, Volume V, Nomor 1, April 2014.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.